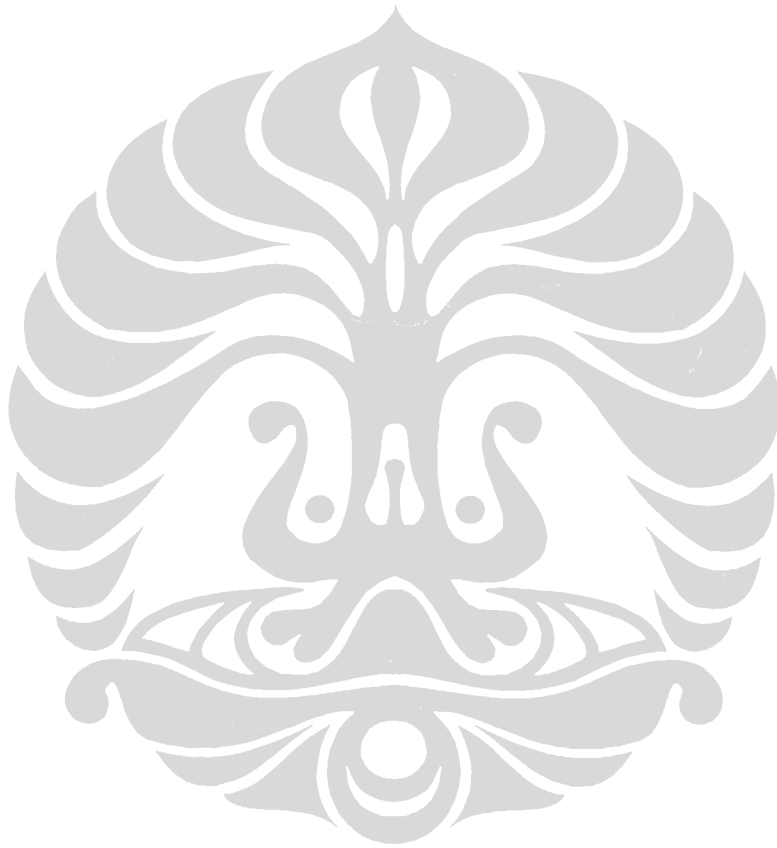


LAMPIRAN I
HASIL WAWANCARA



| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nama Narasumber | : Yudho Giri S. PhD, CISA |
| Jabatan/Posisi Narasumber | : Kontributor Pembuatan PeGI |
| Tanggal & Waktu Wawancara | : 5 Desember 2008, pukul 18.15 s.d selesai |
| Topik Wawancara | : PeGI dan karakteristik unik e-Government Indonesia |
| Metode | : Tatap Muka |

Hasil Wawancara:

1. Kenapa tidak menggunakan *framework* yang sudah ada?

Karena ada beberapa indikator yang ada tidak bisa mentah-mentah diterapkan di Indonesia, seperti CIO yang ada di Waseda. Oleh karena itu dipecah-pecah, sehingga indikatornya menjadi lebih sederhana. Seperti yang diketahui, masih banyak provinsi di Indonesia yang e-Government-nya masih sederhana, sehingga kalau diterapkan dengan indikator yang terlalu ideal, maka nilainya akan jadi rendah semua. Walaupun demikian yang ideal tetap ada yang dimasukkan, namun pencapaian-pencapaian kecil tapi punya dampak yang besar juga tetap dicatat. Bahkan sampai dengan aplikasi-aplikasinya apa saja, juga dilihat. Sehingga jangan sampai ada daerah yang aplikasi dan infrastrukturnya bagus, namun dari sisi kelembagaan dan kebijakannya tidak bagus, maka sama saja dengan e-Government tidak berjalan. Hal ini termasuk pula dengan suatu daerah yang secara kelembagaan dan kebijakan baik, namun secara teknologi tidak baik. Dengan hadirnya PeGI, diharapkan akan adanya keseimbangan dalam dimensi yang ada di PeGI, sehingga Pemerintah

Daerah akan dapat mengetahui pada dimensi yang manakah yang masih kurang dan dapat diperbaiki.

2. Kenapa PeGI tidak dibuatkan sebuah tahapan pemodelan, sehingga setiap Pemerintah Daerah dapat memiliki acuan pengembangan e-Government, seperti yang disebutkan dalam tujuan PeGI ?

PeGI dalam melakukan *assessment* memang melihat pada masing-masing indikator, namun tidak berusaha untuk memetakan pada level *maturity* yang umumnya ada, seperti *initial*, *defined*, dll. Kalaupun dipetakan, maka hasilnya mungkin masih banyak yang ditahap awal. Karena gol-nya sendiri memang untuk melakukan penilaian, walaupun memang di PeGI sendiri juga ada pengkategorian, yaitu sangat kurang, kurang, baik, dan sangat baik. PeGI berusaha untuk memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas usahanya dalam melakukan pengembangan. Indikator yang ada dalam PeGI, tidak yang ideal semua, namun yang biasa juga ada. Mungkin ini bisa di analogikan dengan soal yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa, yaitu tidak semua soal yang diberikan susah, namun ada juga yang mudah, sehingga mahasiswa setidaknya memperoleh nilai. PeGI juga melakukan hal demikian, dengan cara memberikan indikator-indikator yang mungkin dicapai oleh Pemerintah Daerah. Untuk dapat mencapai tujuannya, indikator-indikator dari PeGI umum yang dapat diterapkan di Itulah sebabnya mengapa setiap dimensi yang dimiliki oleh PeGI memiliki indikator yang lumayan banyak.

3. Kenapa perlu membuat PeGI, padahal telah ada Warta Ekonomi yang lebih dahulu membuat *framework* e-Government?

Sebenarnya apa yang ada di Warta Ekonomi, sebagian juga sudah ada yang diterapkan di PeGI, kemungkinan untuk digabungkan juga bisa-bisa saja. Tapi yang jelas PeGI tidak menilai dari satu indikator saja, seperti Warta Ekonomi yang lebih mementingkan web, karena pada kenyataannya e-Government tidak hanya mengenai web saja.

4. Apa yang menyebabkan PeGI tidak menerapkan penilaian dari sisi output dan proses, seperti yang ada di Warta Ekonomi. Misalnya pada sisi output, adalah menghubungi para pengguna layanan untuk mengetahui tingkat kepuasan?

Adanya perbedaan paradigma antara Warta Ekonomi dengan PeGI, dimana Warta Ekonomi hanya melakukan penilaian terhadap daerah yang mendaftarkan diri untuk dinilai, sedangkan PeGI melakukan *assessment* terhadap 33 provinsi di Indonesia. Sehingga PeGI memiliki kendala dalam hal keterbatasan anggaran.

5. Hal apakah yang membuat PeGI dapat dipergunakan untuk berbagai level pemerintahan, yang tentunya setiap level pemerintahan memiliki karakteristik unik masing-masing?

Hal ini dikarenakan semua dimensi yang digunakan dalam PeGI adalah kategori yang umum yang dapat diterapkan dalam semua level pemerintahan di Indonesia.

6. Bagaimana sebenarnya tahapan proses pembuatan PeGI, apa saja yang menjadi input-nya?

Dalam pembuatan PeGI sebenarnya dilakukan dengan rapat berkali-kali antara praktisi, sisi pemerintahan dan akademisi. PeGI dibuat dengan proses yang cukup panjang, mulai dari hanya lima dimensi, sampai dengan turun menjadi

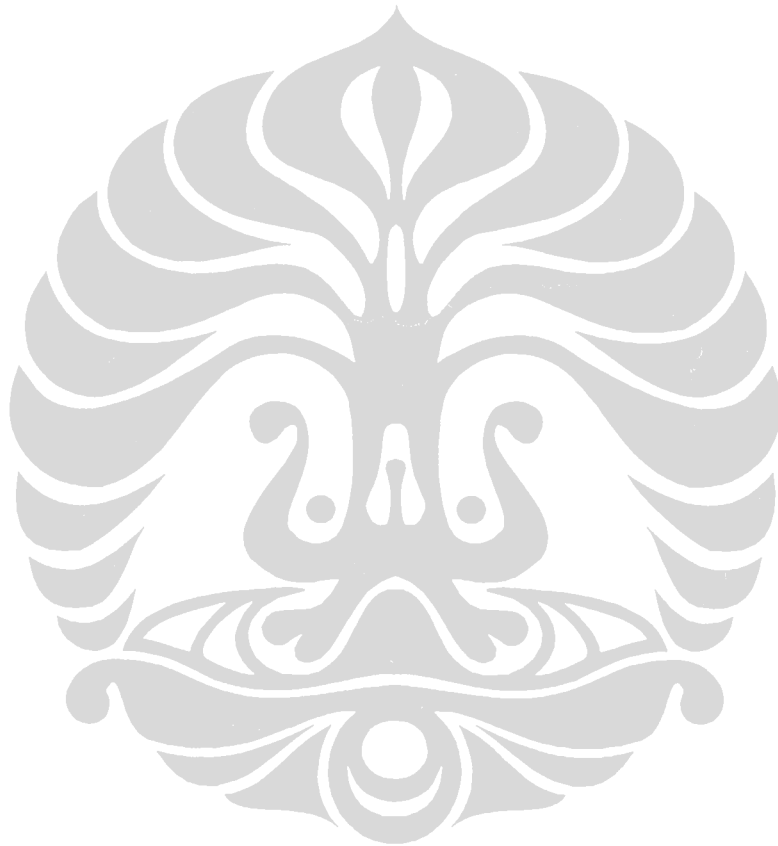
indikator-indikator. Dalam proses-nya juga sempat melihat pemeringkatan lain seperti UN, Waseda, Warta Ekonomi, kemudian dilihat mana yang cukup penting untuk dinilai di Indonesia. Sebagai contoh di Waseda, ada dimensi CIO, namun hal ini tidak bisa diterapkan di Indonesia karena memang di Indonesia, CIO sendiri masih sebatas wacana. Selain itu, hal yang perlu dicatat adalah dalam penyusunan PeGI, tidak difokuskan hanya kepada TI, karena dalam pelaksanaannya ada kepemimpinan, kebijakan, kelembagaan, dan lain-lain yang sebenarnya juga sama pentingnya dalam e-Government.

7. Hal apa sajakah yang dianggap masih kurang dan perlu ada pengembangan dari sisi PeGI?

Kekurangannya, kalo mungkin bisa diterapkan *Process Maturity Framework*.

Tapi memang pertanyaannya, apabila diterapkan di level kota/kabupaten di Indonesia yang begitu banyak dan bagaimana asessor dapat bersikap objektif dalam penilaian. Selain itu, setelah adanya aturan pemerintah mengenai Tata Kelola, mungkin memang sudah ada sebagian dari komponen Tata Kelola yang dimasukkan, seperti Audit. Namun, Tata Kelola tidak hanya itu dan mungkin perlu dilihat kembali komponen-komponen lain yang dapat dimasukkan.

LAMPIRAN II
PENDAPAT *EXPERT* 1



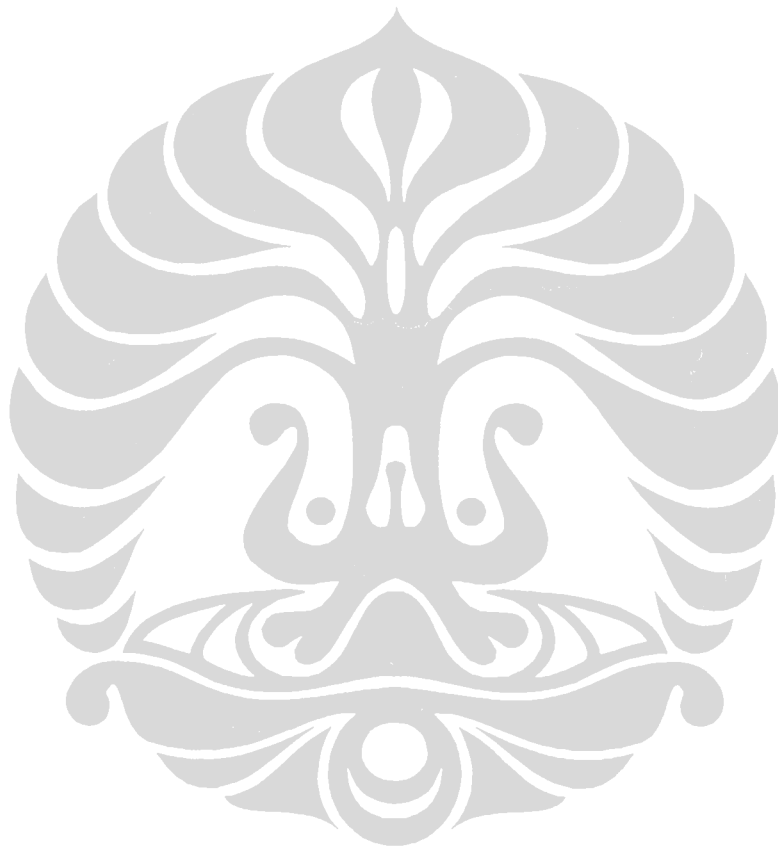
Nama *Expert* : Eko Darussalam
Jabatan/Posisi : Staf KPTI Walikotamadya Jakarta Timur
Tanggal : 19 Desember 2008

Pendapat *Expert*:

Secara umum sudah lengkap, namun mungkin perlu ada sedikit catatan dan pemberian informasi, yaitu:

- Kriteria yang ada di *data center* dan jaringan data akan sangat terkait dengan SDM dan SOP, yaitu kaitannya dengan respon yang diberikan ketika terjadi kegagalan.
- Memasukkan DRP sebagai indikator perlu diperhatikan, karena untuk di walikotamadya Jakarta Timur sendiri belum ada mekanisme DRP.
- Dalam melakukan mekanisme pemilihan *outsourcing*, ada mekanisme tersendiri yaitu berupa TOR, RAB, dan lain-lain.
- Untuk patching jaringan, seharusnya dimasukkan ke dalam Keamanan dan bukan Pemeliharaan.

LAMPIRAN II
PENDAPAT *EXPERT* 2



Nama *Expert* : Budi Yuwono
Jabatan/Posisi : Ketua Lab. *IT Governance* MTI UI
Tanggal : 23 Desember 2008

Pendapat *Expert*:

Secara umum sudah komprehensif dan bisa dikatakan lebih dari memadai. Tetapi sebagian besar berlaku untuk semua organisasi, kecuali dari sisi portofolio aplikasinya yang spesifik pemerintahan. Perlu dilengkapi proses-proses yang relevan untuk semua kategori aplikasi dan infrastruktur. Silahkan cari di referensi.

Yang saya anggap penting tetapi belum masuk adalah kemampuan "*IT project management*". Mengingat tingkat kegagalan proyek-proyek TI bisa 66%, perlu ada porsi perhatian pada kemampuan mengelola proyek-proyek pengembangan/implementasi solusi TI.

Selain dari itu, sudah oke.

LAMPIRAN III
PANDUAN UMUM TATA KELOLA TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL

